

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Corporate Governance

Menurut IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Menurut FCGI (2001) *Good Corporate Governance* merupakan pengaturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Dalam prinsip ini perusahaan harus memiliki sifat transparan, perusahaan harus terbuka terhadap informasi secara benar, jelas dan akurat terhadap kondisi suatu perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan secara eketif, maka akan ada kejelasan mengenai fungsi, hak, wewenang dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Dengan adanya prinsip *responsibility* ini diharapkan mampu untuk menjadikan perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap *stakeholder* dan *shareholder*.

4. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip ini menuntut perusahaan untuk lebih bersifat profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

Mekanisme *corporate governance* meliputi mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal sendiri yaitu ukuran dewan direksi dan mekanisme eksternal yaitu kepemilikan institusional.

1. Ukuran Dewan Direksi

Menurut Wardhani(2007) dewan direksi merupakan suatu mekanisme *corporate governance* yang memiliki tugas untuk menentukan kebijakan dan strategi seperti apa yang akan di ambil oleh perusahaan. Direksi sendiri bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan agar mampu untuk memperoleh keuntungan. Menurut KNKG (2006) ada lima tugas utama mengenai fungsi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh

Direksi, yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial.

Agar dalam pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan efektif, salah satu prinsip yang harus di penuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan dalam pengambilan keputusan secara efektif, cepat dan tepat.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan suatu saham perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Noviawan (2013) kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalisasikan konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Pada dasarnya semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh intitusi maka akan semakin besar pula suara dan dorongan dari institusi untuk mengawasi manajemen, sehingga akan menyebabkan kinerja semakin optimal dan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan.

Menurut Nuraeni (2010) kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, dengan adanya kepemilikan institusional sendiri diharapkan dapat mendorong pengawasan terhadap manajemen perusahaan lebih

ketat serta mampu untuk meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham.

Sementara itu dalam suatu perusahaan terdapat sistem pengawasan dan pengendalian yang melibatkan dua pihak yaitu ukuran dewan komisaris dan komite audit.

1. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2006) Dewan Komisaris merupakan sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi serta memastikan apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan dapat berjalan dengan baik. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil dari *shareholder* dalam perusahaan yang berfungsi untuk *monitoring* pengelolaan dan pengembangan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 5, menyatakan bahwasannya setiap perusahaan yang berbentuk perusahaan wajib memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan komisaris akan dapat mempermudah dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen secara umum. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan manajemen dapat

memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan meningkatkan nilai perusahaan

2. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit merupakan suatu komite yang dapat bekerja secara profesional dan independen, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris.

Komite audit sendiri memiliki tugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan *monitoring* terhadap proses laporan keuangan. Collier dan Gregory dalam Harahap menjelaskan bahwasannya komite audit memberikan manfaat untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap GCG.

Berdasarkan surat keputusan dari BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.1.5 menyatakan bahwasannya perusahaan publik wajib untuk memiliki komite audit sekurang-kurangnya memiliki 2 anggota dari luar perusahaan, salah satunya harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan komite Audit

mengadakan rapat sebanyak 3 sampai 4 kali dalam satu tahun untuk membahas mengenai laporan keuangan perusahaan.

2.2 Financial Distress

Menurut Platt dan Platt (2006) *Financial Distress* merupakan suatu kondisi perusahaan mengalami penyimpangan dan tekanan keuangan yang akan mengarah kepada kebangkrutan. Sedangkan menurut Gamayuni (2011) *financial distress* adalah kesulitan keuangan yang kemungkinan terjadi sebagai awal kebangkrutan. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi *financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami keuntungan bersih yang negatif. Ada beberapa definisi kesulitan keuangan menurut Gamayuni yaitu :

1. *Economic failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak menutup biaya total, termasuk biaya modal.

2. *Business failure*

Business failure atau kegagalan bisnis di definisikan sebagai usaha yang menghentikan operasionalnya dengan akibat kerugian bagi kreditor.

3. *Technical insolvency*

Technical insolvency atau insolvensi teknis, yaitu suatu perusahaan dikatakan bangkrut apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Walaupun total aktiva yang dimiliki sudah melebihi total hutangnya.

4. *Insolvency in bankruptcy*

Merupakan kondisi dimana nilai buku dari hutang perusahaan melebihi nilai pasar aset yang dapat mengarah pada likuidasi bisnis.

5. *Legal bankruptcy*, istilah ini biasa digunakan pada setiap perusahaan yang telah gagal. Perusahaan tidak dapat dikatakan bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan resmi dengan undang-undang federal.

Menurut Kordestan dalam Febriani (2010:196) Tahapan dari kebangkrutan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Latency*. Pada tahap ini, *Return on Assets (ROA)* akan mengalami penurunan.
- b. *Shortage of Cash*. Dalam tahap kekurangan kas, perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya kas untuk memenuhi kewajiban saat ini, meskipun masih mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat.
- c. *Financial Distress*. Kesulitan keuangan dapat dianggap sebagai keadaan darurat keuangan, dimana kondisi ini mendekati kebangkrutan.
- d. *Bankruptcy*. Jika perusahaan tidak dapat menyembuhkan gejalakesulitan keuangan (*financial distress*), maka perusahaan akan bangkrut.

(Lizal, dalam Fachrudin, 2008) menyatakan ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya *financial distress*, yaitu sebagai berikut :

1. *Neoclassical model*

Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

2. *Financial model*

Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan yang salah serta mengakibatkan batasan likuiditas. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi perusahaan harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

3. *Corporate governance model*

Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar akan tetapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisien ini mendorong perusahaan menjadi *Out of the market* sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Menurut Platt dan Platt ada berbagai cara untuk melakukan pengujian bahwa suatu perusahaan sedang mengalami *financial distress* antarlain seperti, adanya pemberhentian tenaga kerja atau tidak melakukan pembayaran dividen, *Interest coverage ratio*, arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang saat ini, laba bersih operasi (*net operating income*) negatif serta adanya perubahan harga ekuitas.

Financial distress atau kesulitan keuangan yang terjadi di dalam perusahaan timbul akibat adanya faktor dari dalam maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Menurut Damodaran (2001) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya *financial distress* yang berasal dari dalam perusahaan lebih bersifat mikro, antara lain sebagai berikut :

1. Kesulitan arus kas

Kesulitan arus kas dapat terjadi apabila penerimaan pendapatan suatu perusahaan dari hasil operasi perusahaan tidak dapat mencukupi untuk menutup beban-beban usaha yang ada. Dapat juga karena kesalahan dalam mengelola aliran kas perusahaan yang akan memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

2. Besarnya jumlah hutang

Pada saat perusahaan tidak dapat membayar tagihan atas hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah memasuki jatuh tempo, maka kemungkinan yang terjadi kreditur akan menyita harta perusahaan untuk menutup kekurangan pembayaran tagihan tersebut.

3. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan

Kerugian operasional yang di alami oleh perusahaan akan menyebabkan arus kas negatif. Hal ini di karenakan beban operasi perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang di terima oleh perusahaan.

Untuk memprediksi kebangkrutan pada suatu perusahaan Altman mengkombinasi beberapa rasio menjadi model prediksi dengan analisis diskriminan atau dengan istilah lain Z-score (Altman 1968).

Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah *multivariate formula* yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan *financial* dari perusahaan tersebut. Model Altman Z-score banyak digunakan oleh perusahaan sebagai alat kontrol untuk mengukur situasi keuangan suatu perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan. Altman Z-score ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Z-Score} = 1,2 \text{ X1} + 1,4 \text{ X2} + 3,3 \text{ X3} + 0,6 \text{ X4} + 1,0 \text{ X5}$$

Keterangan :

X1 = Modal kerja terhadap total aktiva (*Working Capital to Total Asset*)

X2 = Laba yang ditahan terhadap total aktiva (*Retained Earning to Total Assets*)

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aktiva (*Earning Before Interest and Taxes to Total Assets*)

X4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (*Market Value Equity to Book Value of Total Debt*)

X5 = Penjualan terhadap total aktiva (*Sales to Total Assets*)

Dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor $Z > 2,99$ di klasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat, sedangkan perusahaan perusahaan yang mempunyai skor $Z < 1,81$ diklasifikasikan sebagai perusahaan yang memiliki potensi untuk bangkrut, selanjutnya apabila skor yang di peroleh $1,81 < Z < 2,99$ di klasifikasikan sebagai perusahaan pada *grey area* dimana pada posisi ini tidak dapat di pastikan apakah perusahaan tersebut mengalami *distress* atau sehat.

Altman melakukan penelitian kembali dengan mengembangkan model alternatif dengan mengganti variabel X4 yang awalnya merupakan perbandingan nilai pasar ekuitas dengan nilai buku total hutang menjadi perbandingan nilai buku saham biasa dan preferen dengan nilai buku total hutang (Cardwell et al. 2003). Persamaan hasil revisi tersebut baik di gunakan untuk perusahaan yang telah *go public*. Menggunakan formula yang terdiri dari lima koefisien yaitu :

$$\text{Z-Score} = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5$$

Keterangan :

X1 = Modal kerja terhadap total aktiva (*Working Capital to Total Asset*)

X2 = Laba yang ditahan terhadap total aktiva (*Retained Earning to TotalAssets*)

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aktiva (*Earning Before Interest and Taxes to Total Assets*)

X4 = Nilai buku saham biasa dan saham preferen terhadap nilai buku total hutang (Market Value of Common and Preferred Stock to Book Value of Debt)

X5 = Penjualan terhadap total aktiva (*Sales to Total Assets*)

Dalam model tersebut perusahaan yang memiliki skor $Z > 2,90$ di klasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki skor $Z < 1,20$ di klasifikasikan sebagai perusahaan *distress* lalu untuk perusahaan yang memiliki skor $2,90 < Z < 1,20$ di klasifikasikan sebagai perusahaan grey area.

Lalu untuk perusahaan non manufaktur, menggunakan formula yang terdiri dari empat koefisien, yaitu :

$$Z\text{-Score} = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4$$

Keterangan :

X1 = Modal kerja terhadap total aktiva (*Working Capital to Total Asset*)

X2 = Laba yang ditahan terhadap total aktiva (*Retained Earning to Total Assets*)

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aktiva (*Earning Before Interest and Taxes to Total Assets*)

X4 = Nilai buku saham biasa dan saham preferen terhadap nilai buku total hutang (Market Value of Common and Preferred Stock to Book Value of Debt)

Pada formula untuk perusahaan manufaktur ini tidak menggunakan X5, Karena pada perusahaan non manufaktur biasanya menawarkan jasa bukan barang. Nilai X5 sendiri menggambarkan *assets turnover* yang dapat memahami seberapa efisien asset yang dimiliki dapat memberikan pendapatan. Karena biasanya pada perusahaan jasa *fixed asset* biasanya tidak berhubungan langsung dengan pendapatan.

Dalam model ini perusahaan yang memiliki score $Z > 2,6$ di klasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki score $Z < 1,1$ di klasifikasikan sebagai perusahaan yang *distress*, dan untuk perusahaan yang memiliki score $1,1 < Z < 2,6$ di klasifikasikan sebagai perusahaan *grey area*.

2.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress*

1. Leverage

Leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*) (Rahmi, 2014). Jika perusahaan terlalu banyak mengandalkan dana utang maka akan timbul kewajiban yang lebih besar dimasa mendatang, dan hal itu akan mengakibatkan perusahaan akan rentan terhadap kesulitan keuangan atau *financial distress*. Semakin kecil leverage maka akan baik dan aman bagi suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan leverage berpengaruh terhadap *financial distress*.

2. Profitabilitas

Menurut Mamduh (2007), rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dicerminkan dalam Return On Asset (ROA). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset. Menurut Keown (2008), indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan adalah ROA (Return On Asset) yang merupakan pengembalian atas aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bersih perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan mudah melakukan diversifikasi dan cenderung lebih kecil mengalami kebangkrutan, (Rajan dan Zingales 1995). Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan, Storey (1994) dalam Fachrudin, (2011).

2.3 Industri Manufaktur

Perusahaan manufaktur merupakan suatu badan usaha yang melakukan aktivitas pengelolaan bahan mentah maupun bahan setengah jadi dengan melewati beberapa proses sehingga menjadi barang jadi yang memiliki nilai

jual lebih. Manufaktur sendiri adalah suatu proses yang menghasilkan produk dengan nilai ekonomis secara nyata dalam bentuk produk. Proses dalam manufaktur juga melibatkan tenaga manusia dan mesin dalam skala yang besar serta dalam pengerjaannya harus sesuai dengan standar prosedur yang sudah di atur.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) di bagi menjadi tiga sektor yaitu :

1. Industri Dasar dan Kimia

Pada sektor industri dasar dan kimia didalamnya terdapat beberapa sub sektor, seperti sub sektor semen, sub sektor keramik, porselen dan kaca, plastik dan kemasan, pulp dan kertas, pakan ternak dan lainnya.

2. Aneka Industri

Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam sektor aneka industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronika, mesin, otomotif, tekstil dan lainnya termasuk sub sektor kabel, alas kaki dan lainnya.

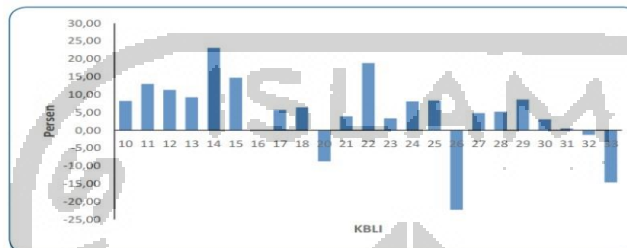
3. Industri Barang Konsumsi

Pada sektor industri barang konsumsi terdapat sub sektor makanand an minuman, rokok, farmasi, peralatan rumah tangga, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga.

Di Indonesia sektor manufaktur sendiri memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, industri manufaktur menjadi salah satu industri yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia baik untuk tingkat nasional maupun daerah, dapt dilihat

dari penyerapan tenaga kerja dan adanya saling keterkaitan terhadap sektor-sektor lainnya.

Gambar 1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-2018 (y-on-y)
Menurut Jenis KBLI 2-digit



(Sumber: Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Industri Manufaktur)

Tabel 2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-2018
Menurut Jenis Industri KBLI 2-digit (persen)

Kode KBLI (1)	Jenis Industri (2)	Pertumbuhan (%) (4)	
		q-to-q (3)	y-on-y
10	Industri Makanan	10,56	8,24
11	Industri Minuman	7,75	12,99
12	Industri Pengolahan Tembakau	1,23	11,30
13	Industri Tekstil	11,63	9,29
14	Industri Pakaian Jadi	10,14	23,13
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-10,62	14,75
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,68	0,06
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	14,71	5,71
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4,33	6,42
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1,17	-8,72
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2,95	3,91
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	7,58	18,84
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	9,86	3,37
24	Industri Logam Dasar	7,41	8,11
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	9,85	8,34
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-6,24	-22,31
27	Industri Peralatan Listrik	9,41	4,82
28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	0,98	5,21
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	15,11	8,60
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	10,74	3,09
31	Industri Furnitur	2,80	0,48
32	Industri Pengolahan Lainnya	-0,32	-1,32
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-1,02	-14,61
	Industri Manufaktur Besar dan Sedang	4,13	5,04

(Sumber: Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Industri Manufaktur)

Dari tabel 2 yang terdapat di atas diketahui mengalami pertumbuhan (*qoq*) dan (*yoy*). *QoQ* atau *Quarter over Quarter* menjelaskan perbandingan ukuran dua waktu yang sama dalam periode yang berbeda dalam satu kuartal. Sedangkan *YoY* atau *Year over Year* sendiri

menjelaskan perbandingan angka pada waktu yang sama pada periode yang berbeda dalam satu tahun.

Menurut Badan Statistik Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur (2018) besar dan sedang pada triwulan III 2018 (*yoy*) mengalami kenaikan sebesar 5,04 Jenis-jenis industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan produksi tertinggi (*yoy*) antara lain seperti industri pakaian jadi yang mengalami kenaikan 23,13%, industri karet, barang dari karet dan plastik naik 18,84%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik 14,75%, industri minuman naik 12,99% dan industri pengolahan tembakau naik 11,30%.

Sedangkan untuk industri manufaktur yang mengalami penurunan produksi tertinggi (*yoy*) terdapat pada industri komputer, barang, elektronik dan optik turun 23,31%, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan turun 14,61%, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia turun 8,72% dan industri pengolahan lainnya turun 1,32%.

Badan Statistik Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur (2018) menyatakan kenaikan pada industri manufaktur besar dan sedang triwulan III 2018 (*qoq*) naik sebesar 4,13 persen terhadap triwulan II 2018. Industri yang mengalami kenaikan produksi tertinggi adalah industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, yaitu naik 15,11%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan terbesar adalah industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, yaitu turun 10,62%.

2.4 Penelitian Terdahulu

Wardhani (2006) melakukan penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* terhadap *financial distress* dengan menggunakan variabel keberadaan dewan komisaris, dewan direksi, perputaran dewan, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan dewan komisaris, dewan direksi dan perputaran dewan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Gusnardi (2008) dengan menggunakan variabel komite audit, pada penelitian tersebut Gusnardi mengatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan yang memiliki komite audit yang baik maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*. Penelitian yang dilakukan Pembayun (2012) mengenai hubungan karakteristik komite audit dengan *financial distress*, hasilnya komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bredart (2014) yang berjudul *Financial distress and Corporate Governance Around Lehman Brothers Bankruptcy*, dimana pada penelitiannya tersebut membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris mengurangi risiko terjadinya *financial distress*. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 312 perusahaan dan menggunakan metode regresi logistik.

Mignali. S, Ahmed. K & Henry. D (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh struktur *Good Corporate Governance* terhadap *Financial distress* menggunakan sebanyak 171 perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan dan sebanyak 106 perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan yang ada di Australia. Hasilnya saham blackholder, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dengan adanya penelitian ini dapat dikatakan bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik kemungkinan akan terhindar dari *financial distress*/kesulitan keuangan daripada perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mudashiru. A, Bakare. I, dan Babatunde.Y (2014) yang berjudul *Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis* menunjukkan bahwa hasil penelitian tata kelola perusahaan memiliki dampak positif pada semua indikator kinerja organisasi. Faktor-faktor ukuran dewan, dewan dan keterampilan manajemen, masa jabatan CEO, ukuran dan independensi komite audit, kepemilikan asing dan institusional, kebijakan dividen dan rapat umum tahunan, semuanya memiliki korelasi positif dengan kinerja organisasi.

Ming, X (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Impact of Corporate Governance on Financial distress: An Evidence from Shanghai* menunjukkan bahwa peningkatan persentase direktur independen,

persentase kepemilikan manajer dan konsentrasi kepemilikan saham dapat mengurangi kemungkinan kerugian sementara jumlah orang di dewan pengawas dan persentase kepemilikan saham direktur negatif efek untung. Selain itu persentase kepemilikan saham direktur harus dikurangi. Dan ditemukan bahwa variabel tata kelola lainnya memiliki dampak yang tidak signifikan pada perusahaan kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Norfian Alifiah (2014) berjudul "*Prediction of financial distress companies in the trading and services sector in Malaysia using macroeconomic variables*", menunjukkan bahwa variabel independen yang dapat digunakan untuk memprediksi perusahaan *financial distress* di PT sektor perdagangan dan jasa di Malaysia adalah *Debt ratio, Total assets turnover ratio, Working capital ratio, Net income to total assets ratio, Base lending rate*.

Pada penelitian yang dilakukan Baimwera dan Muriuki yang berjudul *Analysis of Corporate Financial Distress Determinants: A Survey Of Non Financial Firms Listed In The Nse* (2014) menggunakan analisis regresi untuk memeriksa hubungan antara faktor *financial distress* perusahaan dan *financial distress* itu sendiri. Hasil menunjukkan likuiditas dan leverage memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam menentukan *financial distress*. Sedangkan pertumbuhan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan *financial distress* perusahaan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Ukuran dewan direksi Terhadap *Financial Distress*

Dewan direksi atau dapat juga disebut dengan agen, yang memiliki posisi untuk mengelola perusahaan dan melaksanakan perintah yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Biasanya dewan direksi berjumlah lebih dari satu orang, jumlah dewan direksi yang banyak akan membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*.

H1 : Ukuran dewan direksi memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Financial Distress*

Dalam penelitian Al-Najjar (2009) mengungkapkan adanya perbedaan antara pemegang saham institusional dan pemegang saham perorangan, pemegang saham institusional dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik dengan cara-cara tertentu. Pihak institusional dalam pengawasannya dapat melakukan lebih baik daripada pihak manajerial karena pihak institusional memiliki keuntungan yang lebih untuk memperoleh informasi dan dapat menganalisis segala hal yang berkaitan dengan manajerial.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula pengawasan yang dibutuhkan oleh

perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja manajemen dan terhindar dari *financial distress*.

H2 : Kepemilikan Institusional memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Financial Distress*

Dewan komisaris dalam perusahaan memiliki peran untuk mengawasi implementasi kebijakan direksi. Wardhani (2007) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier* yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi berfungsi untuk melakukan operasional perusahaan sehari-hari.

Semakin besar ukuran dewan komisaris yang dimiliki perusahaan maka dapat meningkatkan pengawasan kinerja operasional perusahaan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress* atau kesulitan keuangan.

H3 : Ukuran dewan komisaris memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.5.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Komite audit pada suatu perusahaan berperan dan bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan dan memastikan terpenuhinya kebijaksanaan keuangan. Komite audit sendiri dibentuk oleh dewan direksi. Komite audit juga bertugas untuk memberikan pandangan mengenai

akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (FCGI, 2002).

Agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas dewan direksi, komite audit perlu memiliki cukup anggota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Besarnya jumlah anggota komite audit akan mempengaruhi kinerja perusahaan, hal ini diharapkan agar anggota komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat menunjang kinerja perusahaan serta dapat menurunkan kemungkinan terjadinya *financial distress*.

H4 : Komite audit memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

2.6 Kerangka Pemikiran

